

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Objek dan Subjek Penelitian**

Objek penelitian adalah suatu kegiatan yang bertujuan menggambarkan penelitian atau sasaran penelitian secara komprehensif (Iwan Satibi, 2017, hlm. 74). Objek penelitian merupakan inti dari penelitian yang dijadikan sumber data guna memahami, menjelaskan, atau memecahkan masalah yang ditemukan dalam penelitian. Ini menjadi landasan bagi keberadaan suatu penelitian. Adapun objek penelitian dalam peneliti ini, yaitu ukuran pemerintah daerah ( $X_1$ ), belanja modal ( $X_2$ ), temuan audit ( $X_3$ ), dan kinerja pemerintah daerah ( $Y$ ). Sementara itu, untuk subjek penelitian ini adalah pemerintah daerah provinsi di Indonesia tahun 2021 – 2022.

#### **3.2 Metode Penelitian**

##### **3.2.1 Desain Penelitian**

Desain penelitian merupakan metode yang diterapkan oleh peneliti untuk memilih, mengumpulkan, dan menganalisis data secara menyeluruh dalam suatu penelitian (Sugiyono, 2019, hlm. 15). Metode dalam penelitian ini adalah metode analisis menggunakan pendekatan kuantitatif. Metode analisis kuantitatif adalah metode penelitian berlandaskan filsafat positivisme yang digunakan untuk meneliti populasi atau sampel tertentu, di mana pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif atau statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan (Sugiyono, 2019, hlm. 16).

#### **3.3 Definisi dan Operasionalisasi Variabel**

Menurut Sugiyono (2019, hlm. 67) variabel adalah suatu atribut atau sifat dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh

peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Dalam penelitian, variabel memegang peranan penting karena menjadi dasar untuk mengukur, menganalisis, dan memahami fenomena yang sedang dikaji. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel independen dan variabel dependen.

### 3.3.1 Variabel Independen

Variabel independen adalah variabel bebas yang memengaruhi atau menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat) (Sugiyono, 2019, hlm. 69). Dalam penelitian ini, variabel independen terdiri dari ukuran pemerintah daerah ( $X_1$ ), belanja modal ( $X_2$ ), dan temuan audit ( $X_3$ ).

#### 3.3.1.1 Ukuran Pemerintah Daerah ( $X_1$ )

Sedyaningsih (2015) menyatakan bahwa ukuran pemerintah daerah dapat dilihat dari banyaknya aset yang dimiliki. Daerah yang memiliki jumlah aset yang besar akan memberikan keuntungan berupa kemudahan dalam kegiatan operasional sehingga memberikan kemudahan bagi pemerintah dalam memberikan pelayanan publik (Noviyanti & Kiswanto, 2016). Penelitian ini menggunakan logaritma natural ( $\ln$ ) dari total aset yang dimiliki pemerintah daerah (Kiswanto & Fatmawati, 2019).

$$\text{Size} = \ln \text{ Total Aset Pemerintah Daerah}$$

Karena besarnya jumlah aset yang dimiliki pemerintah daerah berbeda-beda dan memiliki selisih yang besar sehingga dapat menyebabkan nilai yang ekstrem. Untuk menghindari adanya data yang tidak normal maka data total aset perlu di  $\ln$  kan (Sudarsana & Rahardjo, 2013).

#### 3.3.1.2 Belanja Modal ( $X_2$ )

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk peroleh aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari

satu periode akuntansi. Analisis belanja modal terhadap total belanja merupakan perbandingan antara total belanja modal dengan total realisasi belanja daerah (Y. P. Sari, 2020, hlm. 54). Sehingga pada variabel belanja modal diukur menggunakan:

$$\text{Belanja Modal} = \frac{\text{Belanja Modal}}{\text{Total Realisasi Belanja}}$$

Belanja modal dapat berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah apabila terlaksana dengan baik akan mampu memberikan multiplier effect dalam perekonomian daerah (Halim, 2016, hlm. 211).

### 3.3.1.3 Temuan Audit (X<sub>3</sub>)

Temuan audit merupakan kasus-kasus yang ditemukan dalam pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah atas pelanggaran yang dilakukan terhadap pengendalian intern maupun ketentuan perundang-undangan yang berlaku (Rasyid et al., 2022). Pada penelitian yang dilakukan oleh Anto et al., (2022), temuan audit diukur menggunakan jumlah dari temuan dari pelanggaran atas ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan kelemahan terhadap pengendalian intern yang diperoleh dari pemeriksaan BPK. Pada penelitian ini variabel temuan audit diukur menggunakan:

$$Find = \text{Jumlah Temuan Audit}$$

Semakin banyak temuan yang didapat pemerintah daerah maka dapat mempengaruhi penurunan kinerja pemerintah daerah, sebaliknya semakin sedikit temuan yang didapat maka semakin baik kinerja pemerintah daerah (Qowi et al., 2017).

### 3.3.2 Variabel Dependen

Variabel dependen sering disebut sebagai variabel output, kriteria, konsekuen. Variabel dependen adalah variabel terikat yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas (Sugiyono, 2019, hlm. 69) Dalam

penelitian ini, variabel dependennya adalah kinerja pemerintah daerah provinsi di Indonesia.

### 3.3.2.1 Kinerja Pemerintah Daerah (Y)

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2009, kinerja pemerintah daerah adalah capaian atas penyelenggaraan urusan pemerintah daerah yang diukur dari masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan dampak. EPPD menghasilkan skor dan status kinerja pemerintah daerah sebagai bahan evaluasi pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota pada tahun tersebut. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Kiswanto & Fatmawati (2019) kinerja pemerintah daerah diukur menggunakan skor dan status kinerja pemerintah daerah.

Tabel 3.1 Skor dan Status Kinerja Pemerintah Daerah

No	Skor Kinerja	Status Kinerja
1	0,00 – 1,80	Sangat Rendah
2	1,81 – 2,60	Rendah
3	2,61 – 3,40	Sedang
4	3,41 – 4,20	Tinggi
5	4,21 – 5,00	Sangat Tinggi

Sumber: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024

Pada penelitian ini, peneliti mengubah rentang skor tersebut ke dalam data ordinal dikarenakan data yang diperoleh merupakan variabel diskrit yang memungkinkan terjadinya permasalahan dalam melakukan analisis penelitian pada penelitian ini. Berikut indikator yang digunakan:

- |                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| a. $0,00 - 1,80 = 1$ | d. $3,41 - 4,20 = 4$ |
| b. $1,81 - 2,60 = 2$ | e. $4,21 - 5,00 = 5$ |
| c. $2,61 - 3,40 = 3$ |                      |

Dengan demikian, Pemerintah daerah yang mendapatkan skor dan status sangat tinggi dapat dikatakan bahwa pemerintah daerah melakukan kinerja dengan baik pada tahun tersebut.

Tabel 3.2 Operasionalisasi Variabel

Variabel	Definisi	Indikator	Skala Data
<b>Variabel Independen (X)</b>			
Ukuran pemerintah daerah (X <sub>1</sub> )	Fitriasari (2012) semakin besar ukuran daerah yang ditandai dengan besarnya jumlah aset pemerinta daerah, maka diharapkan akan semakin tinggi kinerja pemerintah daerah.	$Size = \ln \text{ Total Aset}$	Rasio
Belanja Modal (X <sub>2</sub> )	Belanja modal merupakan belanja daerah yang manfaatnya melebihi 1 tahun anggaran (Artha et al., 2015)	BM = $\frac{\text{Realisasi Belanja Modal}}{\text{Total Belanja Daerah}}$	Rasio
Temuan Audit (X <sub>3</sub> )	Temuan audit merupakan kasus-kasus yang	$Find = \text{Jumlah Temuan Audit}$	Nominal

Variabel	Definisi	Indikator	Skala Data
	ditemukan dalam pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah atas pelanggaran yang dilakukan terhadap pengendalian intern maupun ketentuan perundang-undangan yang berlaku (Rasyid et al., 2022).		
<b>Variabel Dependen (Y)</b>			
Kinerja Pemerintah Daerah (Y)	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2009, kinerja pemerintah daerah adalah capaian atas penyelenggaraan urusan pemerintah daerah yang diukur dari masukan, proses, keluaran, hasil,	Skor EPPD: a. $0,00 - 1,80 = 1$ b. $1,81 - 2,60 = 2$ c. $2,61 - 3,40 = 3$ d. $3,41 - 4,20 = 4$ e. $4,21 - 5,00 = 5$	Ordinal

Variabel	Definisi	Indikator	Skala Data
	manfaat, dan dampak.		

### 3.4 Populasi dan Sampel Penelitian

#### 3.4.1 Populasi Penelitian

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2019, hlm. 126). Peneliti mengambil populasi dari seluruh pemerintah daerah provinsi di Indonesia tahun 2021 – 2022, pada tahun 2021 provinsi di Indonesia berjumlah 34 provinsi sedangkan tahun 2022 terdapat pemekaran yang dilakukan pemerintah pusat, sehingga pada tahun 2022 terdapat penambahan 4 provinsi, yang mengakibatkan penambahan jumlah provinsi sebanyak 38 provinsi. Dengan demikian, peneliti memutuskan untuk menggunakan 38 provinsi yang ada di Indonesia sebagai populasi penelitian. Sehingga banyaknya populasi penelitian sebanyak 76 dengan dua tahun pengamatan.

#### 3.4.2 Sampel Penelitian

Sampel adalah bagian kecil yang diambil dari populasi untuk merepresentasikan karakteristik dan sifat-sifat yang dimiliki oleh keseluruhan populasi, sehingga memungkinkan dilakukan analisis tanpa melibatkan seluruh elemen populasi (Sugiyono, 2019, hlm. 127). Teknik dalam pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel berdasarkan pertimbangan kriteria tertentu (Sugiyono, 2019, hlm. 133). Dalam penentuan sampel, teknik *purposive sampling* dipakai pada penelitian ini atas ketentuan:

1. Pemerintah provinsi yang mendapatkan Skor EPPD tahun 2021 – 2022.
2. Pemerintah provinsi yang memiliki laporan realisasi anggaran (LRA) dan neraca yang dapat dilihat di masing-masing laman resmi pemerintah daerah provinsi.
3. Pemerintah provinsi yang memiliki temuan audit BPK berdasarkan laporan hasil pemeriksaan BPK (LHP).

Diperoleh hasil pemilihan sampel dengan teknik *purposive sampling* terhadap populasi penelitian yakni pemerintah provinsi di Indonesia sebagai berikut:

Tabel 3.3 Kriteria Pemilihan Sampel

No	Kriteria Sampel	Jumlah
1.	Populasi : Pemerintah provinsi di Indonesia.	38
<b>Pengurang atas kriteria sampel</b>		
1.	Pemerintah provinsi yang tidak mendapatkan skor EPPD.	(4)
2.	Pemerintah provinsi yang tidak memiliki laporan realisasi anggaran (LRA) dan neraca.	(0)
3.	Pemerintah Provinsi yang tidak memiliki temuan audit BPK berdasarkan laporan hasil pemeriksaan BPK (LHP) pada laman resmi BPK.	(0)
<b>Jumlah sampel yang memenuhi kriteria</b>		34
<b>Tahun pengamatan</b>		2
<b>Jumlah observasi</b>		68

Setelah dilakukan seleksi dengan teknik *purposive sampling* yang sudah ditetapkan pada penelitian ini, diperoleh 34 pemerintah provinsi di Indonesia dengan dua tahun pengamatan. Sehingga total sampel observasi penelitian ini berjumlah 68. Berikut daftar pemerintah provinsi di Indonesia yang dapat digunakan sebagai sampel pada penelitian ini:

Tabel 3.4 Sampel Penelitian

No	Nama Provinsi	No	Nama Provinsi
1	Provinsi Aceh	18	Provinsi Kepulauan Riau
2	Provinsi Bali	19	Provinsi Lampung
3	Provinsi Banten	20	Provinsi Maluku
4	Provinsi Bengkulu	21	Provinsi Maluku Utara
5	Provinsi DI Yogyakarta	22	Provinsi Nusa Tenggara Barat
6	Provinsi DKI Jakarta	23	Provinsi Nusa Tenggara Timur
7	Provinsi Gorontalo	24	Provinsi Papua
8	Provinsi Jambi	25	Provinsi Riau
9	Provinsi Jawa Barat	26	Provinsi Sulawesi Barat
10	Provinsi Jawa Tengah	27	Provinsi Sulawesi Selatan
11	Provinsi Jawa Timur	28	Provinsi Sulawesi Tenggara
12	Provinsi Kalimantan Barat	29	Provinsi Sulawesi Utara
13	Provinsi Kalimantan Selatan	30	Provinsi Sumatera Barat
14	Provinsi Kalimantan Tengah	31	Provinsi Sumatera Selatan
15	Provinsi Kalimantan Timur	32	Provinsi Sumatera Utara
16	Provinsi Kalimantan Utara	33	Provinsi Sulawesi Tengah
17	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	34	Provinsi Papua Barat

### 3.5 Teknik Pengumpulan Data

Data dapat diperoleh dari sumber primer dan sekunder, data primer adalah data yang langsung diberikan kepada peneliti sedangkan data sekunder merupakan data yang tidak langsung diberikan kepada peneliti (Sugiyono, 2019, hlm. 296). Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data variabel dependen, yaitu pemerintah provinsi yang memiliki skor EPPD dari hasil pelaksanaan EPPD tahun 2021 – 2022, diperoleh dengan hasil observasi dan dokumentasi pada laman resmi pemerintah daerah atau mengajukan permohonan informasi melalui laman resmi Kemendagri. Variabel independen berupa ukuran

pemerintah daerah yang diukur dengan Ln asset dilihat dari neraca laporan keuangan yang diperoleh dari laman resmi pemerintah daerah provinsi masing-masing. Variabel independen berupa belanja modal diperoleh dari laporan realisasi anggaran (LRA) yang dapat diperoleh dari laman resmi pemerintah provinsi masing-masing. Untuk variabel independen temuan audit BPK diperoleh dari laporan hasil pemeriksaan BPK (LHP) pada laman resmi BPK.

### **3.6 Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data adalah kegiatan yang dilakukan ketika data dari seluruh sumber terkumpul di mana kegiatan ini mencakup pengelompokan data berdasarkan variabel dan jenis responden, mentabulasi data berdasarkan variabel, melakukan perhitungan untuk menjawab rumusan masalah dan menguji hipotesis (Sugiyono, 2019, hlm. 206). Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis statistik deskriptif dan pengujian hipotesis menggunakan teknik analisis regresi data panel. Analisis data dilakukan dengan bantuan *software eviews 12 lite student*.

#### **3.6.1 Analisis Statistik Deskriptif**

Penelitian ini menggunakan statistika deskriptif untuk mengetahui gambaran dari setiap variabel yang diteliti dan memberikan penjelasan secara rinci serta analisis dari setiap variabel ukuran pemerintah daerah, belanja modal, dan temuan audit sebagai variabel bebas. Dan kinerja pemerintah provinsi sebagai variabel terikat. statistik deskriptif digunakan untuk mengetahui nilai statistik atas variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian yang nantinya dapat mengetahui gambaran suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata, standar deviasi, maksimum, dan minimum (Pasaribu et al., 2023).

#### **3.6.2 Analisis Regresi Data Panel**

Penelitian ini menggunakan metode analisis data berupa analisis regresi data panel. Regresi data panel digunakan karena penelitian menggunakan data times series dan cross section sehingga dapat mengetahui pengaruh kinerja pemerintah

daerah yang lebih representatif (Imam Ghazali & Ratmono, 2017, hlm. 185). Model regresi data panel yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 \text{Ln\_TA} + \beta_2 \text{bm} + \beta_3 \text{temuan} + \dots + \epsilon$$

Keterangan:

Y	= Skor Kinerja Pemerintah Daerah
$\alpha$	= Koefisien Konstanta
$\beta$	= Koefisien Regresi Variabel Independen
Ln_TA	= Ukuran Daerah
Bm	= Belanja Modal
Temuan	= Temuan Audit
$\epsilon$	= eror

### 3.6.3 Estimasi Model Regresi Data Panel

Menurut Imam Ghazali & Ratmono (2017, hlm. 214) untuk mengestimasi model regresi data panel terdapat beberapa pendekatan antara lain:

#### 1. *Common Effect Mode*

Model *Common Effect* merupakan model sederhana yaitu menggabungkan seluruh data *times series* dengan *cross section*, selanjutnya digunakan estimasi menggunakan *OLS (Ordinary Least Square)*. Di mana dalam metode ini hanya menggabungkan data tanpa melihat perbedaan antar waktu dan individu.

#### 2. *Fixed Effect Model* atau *Least Square Dummy Variabel (LSDV) Regression Model*

Teknik model ini adalah teknik mengestimasi data panel menggunakan variabel *dummy* untuk menangkap adanya perbedaan interseps. Pengertian *fixed effect* ini didasarkan adanya perbedaan intersep antar unit individu,

namun intersepnya sama antar waktu. Dalam model ini diizinkan terjadinya perbedaan nilai parameter yang berbeda-beda baik *cross section* maupun *time series*

### 3. *Random Effect Model* (REM) atau *Error Components Model* (ECM)

*Random Effect Model* digunakan untuk mengatasi kelemahan model efek tetap yang menggunakan variabel *dummy*, sehingga model mengalami ketidakpastian. Penggunaan model ini dapat mengurangi *degree of freedom* dan pada model ini menggunakan residual yang diduga memiliki hubungan *time series* dan *cross section*.

#### 3.6.4 Pemilihan Model Regresi Data Panel

Dari ketiga model yang telah dijelaskan akan dipilih model mana yang paling sesuai dengan tujuan penelitian. Beberapa tahapan pengujian yang dilakukan antara lain:

##### 1. Uji Chow

Uji *Chow* bertujuan untuk memilih model yang terbaik antara model *common effect* atau model *fixed effect* yang akan digunakan untuk melakukan regresi data panel. Kriteria yang dijadikan pedoman ketika pengambilan keputusan uji *chow* adalah sebagai berikut:

- a. Apabila nilai *probability cross section chi-square*  $< \alpha$  (0,05), maka model *fixed effect* yang akan dipilih.
- b. Apabila nilai *probability cross section chi-square*  $> \alpha$  (0,05), maka model *common effect* yang akan dipilih.

##### 2. Uji Hausman

Uji Hausman dilakukan untuk memilih model yang terbaik antara model *fixed effect* dan model *random effect* yang akan digunakan untuk melakukan regresi data panel. Kriteria yang dijadikan pedoman ketika pengambilan keputusan dari uji hausman ini adalah sebagai berikut:

- a. Apabila nilai *probability cross section chi-square*  $< \alpha$  (0,05), maka model *fixed effect* yang akan dipilih.

- b. Apabila nilai *probability cross section chi-square*  $> \alpha$  (0,05), maka model *random effect* yang akan dipilih.

### 3.6.5 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik yang digunakan dalam regresi linier dengan pendekatan *Ordinary Least Squared* (OLS) meliputi uji linieritas, autokorelasi, heteroskedastisitas, multikolinieritas dan normalitas. Walaupun demikian, tidak semua uji asumsi klasik harus dilakukan pada setiap model regresi linier dengan pendekatan OLS. Uji asumsi klasik untuk data panel hanya menggunakan uji multikolinieritas dan heteroskedastisitas (Agus Tri Basuki & Nano Prawoto, 2015, hlm. 272).

#### 1. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas (independen). Model yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen (Imam Ghazali & Ratmono, 2017, hlm. 75). Jika ada korelasi yang tinggi diantara variabel-variabel bebasnya, maka hubungan antar variabel bebas terhadap variabel terikatnya menjadi terganggu.

Untuk mendeteksi ada tidaknya multikolinieritas dapat dilihat dari besaran *Variance Inflation Factor* (VIF) dan *Tolerance*. Pedoman suatu model regresi yang bebas multikolinieritas adalah mempunyai angka *tolerance* mendekati 1. Batas VIF adalah 10, jika nilai VIF dibawah 10 maka tidak terjadi gejala multikolinieritas (Agus Tri Basuki & Nano Prawoto, 2015, hlm. 52)

#### 2. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan kepengamatan lainnya. Jika varians dari residual satu pengamatan kepengamatan lain tetap, maka disebut homokedastisitas dan jika berbeda

disebut heteroskedastisitas. Model yang baik adalah homokedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas (Imam Ghozali & Ratmono, 2017, hlm. 80).

Metode yang digunakan untuk uji heteroskedastisitas pada penelitian ini adalah uji glejser. Model memenuhi persyaratan apabila nilai probabilitas ch-square nya melebihi nilai  $\alpha = 0,05$  (Agus Tri Basuki & Nano Prawoto, 2015, hlm. 202)

### **3.6.6 Koefisien Determinasi ( $R^2$ )**

Koefisien determinasi ( $R^2$ ) digunakan untuk mengukur kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel independen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai  $R^2$  yang kecil berarti, kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen sangat terbatas (Imam Ghozali & Ratmono, 2017, hlm. 55). Koefisien determinasi dalam penelitian ini digunakan untuk menjelaskan seberapa jauh variabel ukuran pemerintah daerah, belanja modal, dan temuan audit memengaruhi kinerja pemerintah daerah provinsi yang diukur dengan nilai skor SKPPD.

### **3.6.7 Uji Parsial (Uji t)**

Uji parsial digunakan untuk menguji pengaruh variabel independen secara individual dalam menerangkan variabel dependen (Imam Ghozali & Ratmono, 2017, hlm. 57). Pada penelitian ini tingkat signifikansi yang digunakan adalah 0,05 atau  $\alpha = 5\%$ . Dasar pengambilan keputusan dari uji t ini dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Jika nilai probabilitas lebih besar dari 0,05, maka variabel independen tidak memiliki pengaruh secara individual terhadap variabel dependen ( $H_0$  diterima dan  $H_A$  ditolak).
- b. Jika nilai probabilitas lebih kecil dari 0,05, maka variabel independen memiliki pengaruh secara individual terhadap variabel dependen ( $H_0$  ditolak dan  $H_A$  diterima).

Berikut merupakan rumusan hipotesis sebagai jawaban sementara akan diuji melalui uji statistik t, yaitu:

1. Hipotesis untuk Ukuran Pemerintah Daerah

$H_01$  : Ukuran Pemerintah Daerah tidak berpengaruh terhadap Kinerja Pemerintah Daerah.

$H_{A1}$  : Ukuran Pemerintah Daerah berpengaruh terhadap Kinerja Pemerintah Daerah.

2. Hipotesis untuk Belanja Modal

$H_02$  : Belanja Modal tidak berpengaruh terhadap Kinerja Pemerintah Daerah.

$H_{A2}$  : Belanja Modal berpengaruh terhadap Kinerja Pemerintah Daerah.

3. Hipotesis untuk Temuan Audit

$H_03$  : Temuan Audit tidak berpengaruh terhadap Kinerja Pemerintah Daerah.

$H_{A3}$  : Temuan Audit berpengaruh terhadap Kinerja Pemerintah Daerah.